

Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Rizky Alif Alvian, Ganesh Cintika Putri, Irfan Ardhani

Institute of International Studies (IIS)

International Relations Department, Faculty of Social and Political Science

Gadjah Mada University

Bulak Sumur, Yogyakarta 55281

rizky.alif.a@mail.ugm.ac.id

Submitted: 16 October 2017, Accepted: 29 March 2018

Abstract

This article attempts to identify changes in Indonesia's middle power diplomacy strategy under President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo. This phenomenon is important to be studied because President Yudhoyono and President Widodo proposed different visions of Indonesia's foreign policy, yet similarly perceived Indonesia's position as a middle power country. Using border and maritime diplomacy as well as democracy, Islam, and human rights as case studies, this article argues that the strategy of Indonesia's middle power diplomacy experienced a shift in orientation from—to use Krasner's terminology—relational power to meta-power. While Indonesia under Yudhoyono previously attempted to gain benefits by following established rules, Indonesia under Widodo tried to pursue its interests by influencing, altering, or crafting rules in international politics.

Keywords: *Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, middle power, relational power, meta-power.*

Abstrak

Artikel ini berupaya mengidentifikasi perubahan strategi diplomasi *middle power* Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Fenomena ini penting untuk dikaji karena Presiden Yudhoyono dan Joko Widodo mengajukan visi yang berbeda mengenai politik luar negeri Indonesia, tetapi sama-sama memaknai posisi Indonesia sebagai negara *middle power*. Dengan menggunakan isu diplomasi perbatasan dan maritim serta demokrasi, Islam, dan hak asasi manusia sebagai studi kasus, artikel ini berargumen bahwa strategi diplomasi *middle power* Indonesia mengalami pergeseran orientasi dari—meminjam terminologi Krasner—*relational power* menuju *meta-power*. Apabila Indonesia di bawah Yudhoyono sebelumnya berupaya meraih lebih banyak keuntungan dengan mengikuti aturan main yang mapan, Indonesia di bawah Widodo kini berusaha mencapai kepentingannya dengan cara mempengaruhi, mengubah, atau membangun aturan main dalam politik internasional.

Kata Kunci: *Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, middle power, relational power, meta-power.*

PENDAHULUAN

Kemenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan umum 2014 menandai perubahan corak politik luar negeri Indonesia. Orientasi ke “luar” (*outward looking*) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh orientasi ke “dalam” (*inward looking*) Presiden Joko Widodo. Upaya Indonesia untuk mengambil peran global melalui aktivitas-aktivitas multilateral digantikan dengan upaya untuk membangun politik luar negeri

yang dapat memberi keuntungan domestik serta memperkuat kedaulatan Indonesia (lihat, Davies dan Haris-Rimmer, 2016; Andika, 2016; Harding dan Mechant, 2016; Rosyidin, 2017).¹ Meski demikian, di tengah perubahan orientasi ini, Yudhoyono maupun Jokowi melihat Indonesia sebagai negara *middle power*² serta berupaya membangun diplomasi *middle power* Indonesia.

Pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia nampak dalam perubahan visi Indonesia dalam politik internasional. Pada tataran visi, Indonesia di bawah Yudhoyono berusaha mengaplikasikan visi “*thousand friends and zero enemy*”. Melalui prinsip ini, Indonesia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan seluruh negara, sehingga dalam kata-kata Presiden Yudhoyono (2009), “*no country perceives Indonesia as an enemy and there is no country which Indonesia considers an enemy. Thus Indonesia can exercise its foreign policy freely in all directions, having a million friends and zero enemies*”. Di tengah meningkatnya interdependensi antar-negara, pemerintahan Yudhoyono mendorong agar negara-negara bekerjasama untuk mengatasi tantangan kolektif.

Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berangkat dari visi yang berbeda. Jokowi secara eksplisit berupaya “mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global” (Widodo dan Kalla, 2014: 12). Jokowi berkomitmen untuk menjaga “kebebasan dalam menentukan arah hubungan luar negeri yang mengabdikan pada kepentingan nasional” serta “menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia” (Widodo dan Kalla, 2014: 12). Visi politik luar negeri Jokowi ini beresonansi dengan kritik terhadap politik luar negeri Yudhoyono yang dirasa elitis dan tak punya hubungan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya pengembangan ekonomi dalam negeri (Sukma, 2016; Rosyidin, 2017).

Artikel ini berupaya membandingkan strategi diplomasi *middle power* Indonesia di bawah Presiden Yudhoyono (khususnya pada periode kedua) dan Jokowi serta mengidentifikasi perubahan strategi di antara keduanya. Seiring dengan perubahan paradigma kedua presiden dalam memandang politik internasional, fakta bahwa kedua presiden tetap berupaya untuk membangun diplomasi *middle power* Indonesia merupakan suatu fenomena yang penting untuk dikaji. Apa pendekatan yang diajukan oleh Presiden Yudhoyono dan Jokowi dalam

menerjemahkan dan mempraktikkan diplomasi *middle power* Indonesia? Mengapa pergeseran strategi tersebut terjadi?

Artikel ini berpendapat bahwa strategi diplomasi *middle power* Indonesia telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini terjadi utamanya pada jenis *power* yang digunakan Indonesia. Berangkat dari pengembangan atas konseptualisasi Krasner (1985) mengenai *relational-power* dan *meta-power*³, artikel ini berargumen bahwa peran *meta-power* semakin sentral dalam strategi diplomasi *middle power* Indonesia. Berbeda dengan *relational-power* yang menuntut sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya dengan mula-mula mengikuti aturan main yang dominan dalam rezim internasional, *meta-power* mendorong negara untuk mengubah aturan main rezim sehingga menjadi kondusif bagi kepentingannya. Sebelumnya, strategi diplomasi *middle power* Indonesia lebih banyak dibangun di atas konsepsi *relational-power*. Dengan kata lain, apabila Indonesia sebelumnya berupaya meraih lebih banyak keuntungan dengan mengikuti aturan rezim yang mapan, Indonesia kini berusaha mencapai kepentingannya dengan mempengaruhi, mengubah, atau membangun aturan main rezim. Praktik *relational power*, menurut Krasner, antara lain nampak dalam negosiasi bantuan pembangunan bilateral (*bilateral aid*). Dalam situasi ini, negara berkembang berusaha untuk memaksimalkan besaran dan mengurangi prasyarat bantuan. Walau demikian, negosiasi ini tidak mengubah aturan main dasar dari bantuan pembangunan Utara-Selatan: bahwa negara donor berhak untuk menggunakan bantuan itu sebagai sarana mencapai kepentingannya. Sementara itu, Krasner mengambil proposal *New International Economic Order* (NIEO) sebagai contoh praktik *meta-power*. Dihadapkan pada rezim ekonomi internasional yang berorientasi pasar, negara-negara berkembang berusaha merancang aturan main alternatif yang memungkinkan negara berkembang untuk mempertahankan otoritasnya di hadapan kekuatan pasar. Bagi negara berkembang, strategi ini krusial karena mereka memiliki kesempatan untuk mengurangi kerentanan negara terhadap dinamika pasar yang fluktuatif.

Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa tren pergeseran dari *relational power* ke *meta power* dalam politik luar negeri Indonesia terjadi secara tidak merata di seluruh bidang. Pergeseran ini juga tidak sempurna. Perubahan ke arah *meta-power* tidak pernah membuat strategi berbasis *relational-power* benar-benar menghilang.

Untuk mengurai argumentasi di atas, artikel ini mula-mula akan mendiskusikan karya-karya terdahulu mengenai *middle power* maupun perilaku Indonesia sebagai *middle power*. Artikel ini selanjutnya akan menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan oleh artikel ini untuk membaca perubahan strategi diplomasi *middle power* Indonesia. Dengan menggunakan isu diplomasi perbatasan dan maritim serta, demokrasi, Islam, dan HAM, artikel ini kemudian berusaha untuk memetakan perubahan pendekatan diplomasi *middle power* Presiden Yudhoyono dan Jokowi. Artikel ini kemudian ditutup dengan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

INDONESIA SEBAGAI NEGARA 'MIDDLE POWER'

Bagian ini berusaha mengidentifikasi berbagai pandangan mengenai status dan perilaku Indonesia sebagai negara *middle power* serta mengontekstualisasikannya dalam lanskap perdebatan *middle power* yang lebih luas. Karya-karya mengenai status dan perilaku Indonesia sebagai *middle power* dapat digolongkan ke dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama berargumen bahwa status *middle power* Indonesia diraih berkat kepemilikannya atas sejumlah sumber daya kunci seperti populasi, kekuatan militer, atau besaran *Gross Domestic Product* (GDP). Analisis Ping (2003) dapat menjadi ilustrasi tentang bagaimana pendekatan pertama bekerja. Ping (2003) menggolongkan Indonesia dan Malaysia sebagai negara *middle power* di wilayah Asia Pasifik karena keduanya memiliki posisi menengah dalam beberapa indikator, yakni (1) populasi; (2) wilayah geografis; (3) pengeluaran militer; (4) GDP; (5) pertumbuhan riil GDP; (6) nilai ekspor; (7) *Gross National Income* (GNI) per kapita; (8) persentase perdagangan dalam GDP; dan (9) angka harapan hidup (lih., Ruhama, 2015). Mengikuti nalar Ping,

negara *middle power* adalah negara yang memiliki posisi menengah dalam hierarki *power*. Pada gilirannya, *power* ini dijangkarkan pada kepemilikan berbagai sumber daya yang dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator di atas. Ping (2003: 44) menulis:

“If a case can be built for the definition of a particular state to be classified as one in the middle of some form of power, then that gives the definition ample information about which to be critical but allows for the evolution of the term along with the evolving international political economy. Thus, a definition of a MP (Middle Power) is legitimate if it includes the source of the power and identifies a middle position.”

Perubahan status *middle power* karenanya dapat dilacak melalui koleksi data statistik atas indikator-indikator yang disebutkan sebelumnya serta menentukan posisi suatu negara dalam hierarki sumber daya. Melalui usaha tersebut, dapat diketahui apakah sebuah negara menjadi *middle power* atau justru kehilangan status tersebut.

Untuk mempertahankan posisinya, negara *middle power* dituntut untuk mengambil manuver-manuver yang membuat mereka tetap kompetitif dalam lanskap politik internasional yang terus berubah. Upaya ini yang disebut Ping sebagai ‘hibridisasi’. Kepemilikan *power* pada tingkat menengah membuat negara *middle power* memiliki ruang untuk bermanuver alih-alih semata tunduk pada negara besar. Namun, karena *power* negara-negara tersebut sebatas menengah, mereka mesti berkompromi dengan tekanan sistem internasional. Dilema inilah yang membuat inisiatif negara *middle power* bersifat ‘hibrid’.

Melalui hibridisasi, negara *middle power* seperti Indonesia melakukan emulasi atas perilaku negara-negara besar sembari terus menyesuaikan diri dengan perkembangan politik internasional. Kegagalan melakukan hibridisasi akan membuat negara *middle power* kehilangan status serta otonominya. Bagi Ping (2003), upaya Indonesia untuk mengadopsi demokrasi, membentuk dan melibatkan diri dalam ASEAN, serta mengimplementasikan rekomendasi IMF pasca krisis finansial Asia merupakan bentuk hibridisasi tersebut.

Pendekatan kedua berargumen bahwa Indonesia dapat disebut sebagai *middle power* karena

Indonesia memiliki pola perilaku tertentu yang dianggap khas negara *middle power*. Dibandingkan dengan pendekatan pertama, karya-karya yang berangkat dari pendekatan kedua lebih mendominasi kajian-kajian tentang status Indonesia sebagai *middle power*.

Pendekatan kedua berpendapat bahwa status *middle power* suatu negara ditentukan oleh pola perilakunya. Mengutip Darmosumarto (2009), Beeson dan Lee (2015: 230) berargumen bahwa Indonesia “has not only begun to act like a middle power in playing a more prominent part in various multilateral organizations, but has also begun to use the language of middlepowerdom is especially significant”. Perilaku *middle power* yang dimaksud oleh Beeson dan Lee adalah tindakan Indonesia yang semakin banyak terlibat dalam forum-forum multilateral serta berusaha menjadi jembatan bagi *great power* dan *small power* di dalamnya. Bagi Beeson dan Lee, keterlibatan dalam forum multilateral serta aktivitas *bridge-building* merupakan perilaku khas negara *middle power*. Argumen senada diusung oleh Azra (2015). Dalam analisisnya, Azra (2015: 133) berpendapat bahwa status *middle power* Indonesia diraih berkat aktivitasnya dalam organisasi internasional serta upayanya sebagai “*balancing and mediating force for countries that were involved in internal conflicts or even among countries in a certain region*”.

Analisis Ruhama (2015) dan Santikajaya (2016) memberikan kompleksitas tambahan terhadap pendekatan ini. Untuk menangkap kompleksitas perilaku Indonesia sebagai negara *middle power*, Ruhama membedakan *classic middle power* dari *emerging middle power*. Negara-negara *classic middle power* memiliki sejumlah penanda perilaku seperti berupaya menjadi *bridge-builder*, *interlocutor*, serta mediator dalam politik internasional. Sementara itu, negara *emerging middle power* berupaya menegaskan independensinya serta membangun kekuatan di kawasan. Ruhama berargumen bahwa perilaku Indonesia di bawah Presiden Yudhoyono sesuai dengan kriteria *classic middle power* sementara Presiden Jokowi membuat Indonesia berperilaku layaknya *emerging middle power*. Santikajaya (2016) membangun argumentasi lebih jauh bahwa Indonesia bukanlah negara *middle power*. Perilaku Indonesia, menurutnya, berada di antara

perilaku negara-negara *middle power* (berorientasi pada *status quo*, bergerak sebagai mediator, dan punya pengaruh yang lemah di kawasan) dan negara-negara BRIC (revisionis, mencari status *great power*, dan orientasi regional yang lemah). Berbeda dengan negara-negara di kedua kutub tersebut, Indonesia mengambil sikap *soft-revisionis*, menjadi *bridge-builder*, serta memiliki pengaruh kuat di kawasan.

Kedua kelompok karya ilmiah yang telah didiskusikan di atas merefleksikan dua pendekatan arus utama dalam studi terhadap negara-negara *middle power*. Pendekatan pertama terinspirasi oleh argumentasi neorealisme yang dirumuskan oleh Holbraad (1984). Sementara pendekatan kedua banyak dipengaruhi oleh analisis liberal Cooper, Higgot, dan Nossal (1993).

Pertama, Holbraad (1984) berpendapat bahwa negara *middle power* ditentukan berdasarkan “*strength they possess and the power they command*”. Negara *middle power* ditentukan berdasarkan kemampuannya untuk memaksakan kehendaknya kepada negara lain sembari menentang kehendak negara lain yang dipaksakan terhadapnya. Kemampuan ini, menurut Holbraad, bisa dilihat dari sejumlah indikator. Dalam jangka pendek, Holbraad berpendapat bahwa kemampuan ini didasari oleh kekuatan militer suatu negara, tingkat pengeluaran militer, serta kuantitas perangkat militer tertentu yang memiliki nilai strategis. Sementara itu, dalam jangka panjang, besaran GNP dan populasi bisa menjadi indikator kemampuan suatu negara untuk menciptakan pengaruh. Dalam hierarki sistem internasional, negara *middle power* adalah negara yang berada pada bagian tengah hierarki sehingga juga memiliki kemampuan mempengaruhi yang relatif moderat: lebih rendah dari negara-negara *great power* tetapi berada di atas negara-negara *small power*.

Di dalam sistem internasional yang dihegemoni oleh kekuatan besar, negara *middle power* sebetulnya tidak memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengatur arah sistem internasional. Negara-negara besar menjadi aktor yang lebih menentukan bagaimana sistem internasional bekerja. Di sisi lain, negara *middle power* juga memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang terjadi di dalam sistem internasional. Dalam lanskap ini, negara *middle power* berusaha untuk mengambil peran dalam forum-forum multilateral dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk memitigasi resiko bagi diri mereka sendiri. Dengan mengambil bagian dalam forum-forum tersebut, negara *middle power* dapat meningkatkan pengaruhnya untuk memastikan sistem internasional tetap stabil. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa negara *middle power* kerap terlibat dalam usaha-usaha resolusi konflik. Meningkatnya stabilitas dan prediktabilitas sistem internasional akan membuat negara *middle power* terhindar dari ancaman-ancaman yang timbul akibat instabilitas sistem tersebut (Krasner, 1985; Jordaan, 2003).

Kedua, Cooper, Higgott, dan Nossal (1993) berpendapat bahwa negara *middle power* bisa didefinisikan berdasarkan pola perilakunya. Menurut mereka, negara *middle power* lebih kerap melibatkan diri dalam kerja sama multilateral yang berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai *good international citizenship*. Negara *middle power* berupaya menawarkan *cooperation building*, *entrepreneurial leadership*, serta *role of facilitator* bagi negara-negara lain dalam usaha untuk mengatasi permasalahan global, mulai dari penyebaran epidemi, pelucutan senjata, hingga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Cooper, Higgott, dan Nossal (1993: 19) (dikutip dalam Flesmes, 2007: 8), negara *middle power* dicirikan dengan:

“[...] the tendency to pursue multilateral solutions to international problems, the tendency to embrace compromise positions in international disputes and the tendency to embrace notions of ‘good international citizenship’ to guide diplomacy.”

Upaya-upaya negara *middle power* ini seringkali tampil dalam bentuk *niche diplomacy*. Negara *middle power* yang melakukan *niche diplomacy* akan berusaha meraih posisi kepemimpinan dalam forum-forum multilateral dan mengarahkan forum tersebut dengan bekal reputasi dan keahlian teknis yang mereka miliki. Dengan mengambil kepemimpinan dalam forum-forum multilateral, negara *middle power* dapat memperoleh kedudukan yang dapat memberi mereka dua manfaat, yaitu (1) peningkatan status negara

tersebut dalam sistem internasional (2) meluasnya kesempatan bagi negara-negara tersebut untuk menata sistem internasional sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka. Meski demikian, keterbatasan sumber daya yang mereka miliki membuat mereka tak bisa melibatkan diri dalam terlalu banyak forum. Negara *middle power* mesti memilih fungsi apa yang ia ingin ambil dalam sistem internasional (Cooper, 1997).

Kedua pendekatan di atas memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Pendekatan pertama memiliki definisi yang lebih presisi mengenai negara *middle power*. Dengan meletakkan negara *middle power* sebagai negara yang menempati posisi menengah dalam hierarki *power* politik internasional—dicirikan dengan kemampuannya untuk menengahi tekanan *great power* sembari membangun pengaruhnya sendiri—pendekatan neorealis dapat menghindari sejumlah kesulitan yang dialami oleh pendekatan liberal. Meski demikian, pendekatan neorealis memiliki definisi yang terlalu sempit mengenai *power*.

Pendekatan Cooper, Higgott, dan Nossal (1993) mengandaikan bahwa status *middle power* suatu negara ditentukan berdasarkan pilihan perilaku yang diambilnya, yakni keterlibatan dalam multilateralisme, kecenderungan untuk mengambil sikap kompromis, dan bertindak sebagai *good international citizen*. Meskipun sangat berpengaruh, pendekatan ini memperoleh berbagai kritik karena ketidakmampuannya untuk menjelaskan perilaku berbagai negara yang tidak mengikuti kriteria Cooper, Higgott, dan Nossal, namun tak dapat digolongkan sebagai *great power* maupun *small power*. Chapnick (1999) menyebut pendekatan Cooper, Higgott, dan Nossal sebagai tidak “obyektif” dan “tautologis”. Chapnick (1999: 76) menulis: “that middle powers are those that practice middle power internationalism, and that middle power internationalism describes the behaviour of middle powers is a tautology”.

Dalam karyanya yang ditulis tahun 1997, Cooper berusaha memperluas kerangka analisisnya agar dapat mencakup negara-negara yang berada pada tingkat menengah, tetapi tidak berperilaku dalam kriteria yang telah ditetapkan oleh Cooper, Higgott, dan Nossal (1993). Meski demikian, Cooper (1997:

15) menyadari bahwa upaya mengakomodasi keragaman perilaku negara-negara tersebut “*poses a danger of further diluting the middle-power concept*”. Cooper (1997: 9) menyasiasi hal ini dengan memperluas konsep negara *middle power* sebagai negara yang bekerja lewat “*cooperation-building*”, “*coalition-building*” serta memberikan “*entrepreneurial/technical leadership*” dan “*calatyst and facilitator*”. Sementara Jordaan (2005: 165) berargumen bahwa seluruh negara *middle power* berusaha “*stabilises and legitimises global order*”. Manuver konseptual ini membuka ruang bagi munculnya tipologi “*emerging middle power*” dan “*traditional middle power*” yang menginspirasi karya Ruhama (2015)—di mana negara “*emerging middle power*” dirasa lebih “*combative*” dan “*regional*” ketimbang “*traditional middle power*” yang “*accomodative*” dan “*multilateral*” (Cooper, 1997: 17). Meski demikian, konseptualisasi *middle power* ini tetap dibangun di atas argumen bahwa status *middle power* ditentukan oleh set perilaku yang diambil suatu negara. Batasan ini mendorong Santikajaya (2016) untuk meninggalkan konsep *middle power* untuk menggambarkan Indonesia. Karena Indonesia mengambil set perilaku yang berbeda dengan kriteria *middle power*, ia memutuskan untuk meletakkan Indonesia di luar kategori tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mengklasifikasikan *middle power* berdasar pola perilakunya menjadi kurang produktif. Perubahan sistem internasional membuka ruang bagi banyak variasi perilaku. Memperluas konsep *middle power* untuk merangkum segala bentuk perilaku akan membuat konsep itu terlalu longgar. Sementara upaya untuk mempersempitnya akan membuat konsep *middle power* memiliki ruang lingkup analisis yang terlampau kecil.

Pada titik ini, konseptualisasi Holbraad (1984) tentang *middle power* menjadi lebih berguna. Argumentasi Holbraad (1984: 5) layak dikutip cukup panjang di sini:

“The number of great powers in the system and the political relations that exist between these chief actors determine the international environment of the lesser states and influence their behaviour, towards the great powers as well as among themselves. The middle power, closer to the top level of international politics, tend to be particularly sensitive to the conditions that prevail

there. For them, each systemic situation presents its own set of difficulties and opportunities. [...] [T]he reactions of middle powers in comparable international situations may be expected to show some similarities. All of them exposed to the competitive conditions of international society and determined to survive and prosper, they can neither afford persistently to ignore the threats and encouragements presented by the structure of the system and the interaction of its principal actors, nor repeatedly fail to exercise a degree of rationality in their response to them.”

Pendekatan Holbraad ini memberi penekanan kuat pada posisi *middle power* dalam politik internasional. Negara *middle power* di satu sisi mengalami tekanan dari situasi internasional yang, pada gilirannya, dipengaruhi oleh interaksi antar *great power*. Dalam arena ini, negara *middle power*—sebagai “*states that are weaker than the great powers in the system but significantly stronger than the minor powers and small states with which they normally interact*” (Holbraad, 1984: 4)—berada dalam upaya untuk menghindari tekanan sembari memanfaatkan kesempatan yang disediakan struktur. Artikel ini akan berangkat dari argumentasi ini. Dalam artikel ini, *middle power* dimengerti sebagai negara yang berada dalam posisi ini: ditekan oleh sistem internasional, tetapi masih memiliki kapasitas untuk bertahan dan memanfaatkan kesempatan.

Meski demikian, pendekatan Holbraad memiliki keterbatasan serius dalam memahami dan memperlakukan *power*. Kecenderungan untuk melihat *power* berdasarkan sumber-sumber material yang dimiliki negara tidaklah keliru. Tetapi, cara ini tak akan cukup berhasil menangkap kompleksitas kasus Indonesia. Pertama, pendekatan Holbraad—yang kemudian diterapkan Ping (2003) untuk Indonesia—tak berhasil memeriksa *power* Indonesia yang bersifat non-material. Padahal, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai analisis, *power* Indonesia tak hanya diperoleh melalui sumber daya material. Laksmana (2011), Acharya (2015), dan Davies dan Haris-Rimmer (2016), misalnya, menunjukkan bahwa *power* Indonesia diperoleh dari posisi normatifnya atas berbagai isu, seperti demokrasi, Islam, dan HAM. Laksmana (2011: 165) menulis bahwa “*democracy provides Indonesia with an excellent window of opportunity to raise its regional and global profile*”.

Kedua, pendekatan ini juga tidak dapat menangkap aspirasi Indonesia untuk menjadi *great power*. Fealy dan White (2016: 93) mencatat bahwa Indonesia “*start taking a bigger and more assertive role, if not as a classic ‘Great Power’ then at least as a major regional power*”. Gejala sejenis diidentifikasi oleh Ardhani (2016) yang menunjukkan bahwa Indonesia menginginkan status negara besar melalui berbagai upaya glorifikasi atas masa lalu. Pendekatan yang diajukan Holbraad—juga oleh neorealis lain seperti Krasner—mengandaikan bahwa manuver negara *middle power* diarahkan lebih untuk menjaga posisi mereka dalam politik internasional atau melindungi otonomi. Pendekatan ini cenderung enggan untuk menyatakan secara eksplisit bahwa negara *middle power* juga menyimpan hasrat untuk tumbuh menjadi negara *great power* meski usaha itu berlangsung lambat dan tak pasti.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berpijak dari diskusi di atas, artikel ini berupaya memperluas konseptualisasi *middle power* sehingga konsep tersebut sensitif terhadap (1) keragaman *power* yang digunakan Indonesia (2) aspirasi Indonesia untuk menjadi *great power*. Artikel ini akan mendiskusikan aspek kedua terlebih dahulu.

Untuk menangkap aspirasi Indonesia untuk menjadi *great power*, artikel ini menggunakan konsep *relational power* dan *meta-power*. Krasner (1985: 14) menulis:

“Relational power behavior refers to efforts to maximize values within a given set of institutional structures; meta-power behavior refers to efforts to change the institutions themselves. Relational power refers to the ability to change outcomes or affect the behavior of others within a given regime. Meta-power refers to the ability to change the rules of the game.”

Dalam konseptualisasi Krasner, negara memiliki dua pendekatan dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kedua pendekatan ini dibedakan berdasarkan sikapnya terhadap suatu rezim. Lewat pendekatan berbasis *relational power*, negara berupaya mencapai kepentingannya tanpa berusaha mengubah aturan main rezim. Sementara itu, lewat pendekatan *meta-power*, negara berupaya

mencapai kepentingannya dengan mengubah aturan main yang dominan.

Mengikuti Holbraad, kekhasan negara *great power* terletak pada kapasitasnya untuk mempengaruhi sistem internasional. Karenanya, aspirasi negara *middle power* untuk menjadi *great power* menuntut mereka untuk tak hanya menggunakan pendekatan *relational power*, tapi juga *meta-power* apabila memungkinkan. Negara *middle power* dituntut untuk turut mempengaruhi arah sistem alih-alih sekadar memastikan kepentingan mereka terpenuhi di dalamnya. Pada titik ini, konsep *relational power* dan *meta-power* dapat berguna untuk menangkap ambiguitas negara *middle power* yang berupaya melakukan gerak defensif dan ofensif sekaligus menengahi tekanan sistem sembari meningkatkan pengaruh. Ketika tekanan begitu kuat, negara *middle power* dapat bekerja dalam modus *relational power* untuk sekadar memastikan kepentingannya terpenuhi. Namun, ketika kesempatan terbuka, negara *middle power* dapat mengubah pendekatannya menjadi *meta-power* untuk membuat sistem jadi lebih menguntungkan baginya.

Meski demikian, dalam *Structural Conflict* (1985), Krasner cenderung memahami konsep *relational power* dan *meta-power* sebagai ekspresi dari “*structural power*” (*strange*) atau “*institutional power*” (Barnett dan Duvall). Artinya, kedua konsep Krasner tersebut memahami *power* sebagai kuasa atas bangunan institusi internasional. Artikel ini berpendapat bahwa konseptualisasi ini tak cukup luas untuk mengenali berbagai sumber dan teknik kerja *power*.

Berangkat dari pembacaan atas karya Barenkoetter (2007) serta Barnett dan Duvall (2005), artikel ini berpendapat bahwa *power* memiliki setidaknya tiga ragam ekspresi. Pertama, *power* diraih melalui kepemilikan atas sumber daya kunci. Melaluinya, negara dapat memaksa aktor lain untuk mengambil suatu tindakan—misalnya, karena rasa takut akibat tindakan akumulasi persenjataan oleh negara lain. Kedua, *power* diperoleh lewat kemampuan mempengaruhi bangunan institusi internasional. Melalui teknik ini, suatu negara dapat membatasi opsi strategis negara lain. Ketiga, *power* diraih lewat

produksi normalitas. Lewat cara ini, negara menyebarkan cara berpikir tertentu yang, pada gilirannya, menentukan apa yang dianggap normal dan tidak. Standar ini kemudian membentuk preferensi negara-negara lain.

Artikel ini mengkombinasikan konsep *relational power* dan *meta-power* dengan ketiga teknik *power* di atas. Sebagai contoh, suatu negara yang memakai teknik pengaturan institusi serta pendekatan *meta-power* akan bergerak untuk membangun institusi yang mendukung kepentingannya. Pendekatan *relational power* dengan teknik yang sama akan mendorong negara untuk meraih posisi strategis dalam institusi atau memanfaatkan aturan main untuk memastikan kepentingannya terpenuhi.

Tabel 1. Kerangka Analisis Diplomasi *Middle Power*

		Pendekatan	
		<i>Relational Power</i>	<i>Metapower</i>
Teknik	Pemenangan konflik via peningkatan sumber daya strategis	Aktor lain mengambil tindakan sesuai keinginan aktor (Holbraad, 1984)	_____
	Pengaturan institusi	Aktor memperoleh posisi strategis dalam institusi yang ada (Cooper, 1997)	Aktor mendesain institusi sementara aktor lain mengikutinya (Barenskoetter, 2007; Barnett dan Duvall, 2005)
	Pengaturan normalitas	Aktor diakui sebagai bagian dari komunitas internasional (Hynek, 2004)	Aktor mendefinisikan normalitas baru yang diikuti aktor-aktor lain (Barenskoetter, 2007; Guzzini, 2013; Nabers, 2015)

Sumber: dirangkum oleh penulis

PEMBAHASAN

STRATEGI DIPLOMASI 'MIDDLE POWER' INDONESIA: PERUBAHAN

Bagian ini mendiskusikan strategi diplomasi *middle power* Presiden Yudhoyono dan Presiden Jokowi serta memetakan perubahan kebijakan di antara keduanya berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibangun pada bagian sebelumnya. Meskipun Yudhoyono dan Jokowi berupaya

menjadikan Indonesia sebagai negara *middle power*, bagian ini mengidentifikasi sejumlah pergeseran strategi di antara keduanya. Bagian ini berpendapat bahwa pendekatan yang diambil Yudhoyono dan Jokowi berbeda dalam isu perbatasan serta demokrasi. Tetapi keduanya menyimpan sejumlah corak yang sama dalam isu perekonomian. Bagian ini akan secara berurutan mendiskusikan strategi Indonesia di bawah kedua presiden dalam isu perbatasan, demokrasi, dan perekonomian.

Diplomasi Perbatasan dan Maritim

Presiden Yudhoyono dan Jokowi selalu meletakkan isu integrasi teritorial Indonesia sebagai salah satu fokus utama mereka. Indonesia di bawah Yudhoyono berfokus pada penyelesaian sengketa perbatasan—baik darat maupun laut—dengan sejumlah negara seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Sementara itu, Indonesia di bawah Jokowi memberi banyak perhatian terhadap kedaulatan laut Indonesia, baik dari ancaman keamanan non-tradisional seperti *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUUF) maupun sengketa wilayah seperti kasus Laut Cina Selatan. Terlepas dari sedikit perbedaan fokus di antara keduanya, upaya Yudhoyono dan Jokowi bisa dimengerti sebagai ekspresi dari upaya keduanya untuk menjaga integritas teritorial Indonesia.

Yudhoyono dan Jokowi mengambil strategi yang berbeda untuk melindungi integrasi teritorial Indonesia. Sementara Yudhoyono mengutamakan jalur penyelesaian sengketa secara damai, Jokowi mengambil pendekatan yang lebih asertif dalam isu kedaulatan laut Indonesia. Yudhoyono berusaha membangun dialog dengan negara-negara yang memiliki sengketa wilayah dengan Indonesia sembari meminimalkan ketegangan antar-negara. Sementara itu, pemerintahan Jokowi bersedia mengambil langkah-langkah konfrontatif dengan negara-negara yang bersengketa maupun dengan negara yang dirasa mengganggu kedaulatan laut Indonesia. Jokowi juga berusaha merancang bangunan institusional di tingkat internasional yang dapat membantu Indonesia melindungi kepentingannya di laut.

Cara-cara damai dalam pemerintahan Yudhoyono digunakan antara lain dalam sengketa

antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina. Dalam kasus sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia mesti menjadikan perang sebagai opsi terakhir ketika jalan-jalan damai tidak berhasil. Dalam kasus sengketa Ambalat, Yudhoyono mengatakan: "Saya ingin bicara untuk didengar negara-negara lain, bagi Indonesia perang jalan terakhir jika tidak ada jalan lain. Bagi setiap perselisihan konflik, kita akan dahulukan cara lain, cara damai" (Sindonews, 26 Oktober 2011).

Pilihan Yudhoyono untuk mengutamakan jalan-jalan damai dilatari oleh keinginannya untuk memastikan Indonesia tidak memperoleh kecaman internasional serta dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa sengketa perbatasan dapat diselesaikan melalui cara yang damai. Di tengah meningkatnya tekanan publik dan aktor domestik agar Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas atas sengketa Ambalat, Yudhoyono mengatakan: "Jangan sampai kita mengeluarkan tembakan-tembakan yang tidak diperlukan. Nanti masyarakat internasional mengecam, mengapa Indonesia melakukan itu". (Viva, 4 Juni 2009) Komentar serupa dibuat oleh Yudhoyono ketika Indonesia berhasil menuntaskan sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Filipina. Yudhoyono mengatakan: "Saya menggarisbawahi bahwa kesepakatan ini merupakan tonggak bersejarah. Ini juga sebuah model dan contoh yang baik bahwa sengketa perbatasan bisa diselesaikan secara damai" (Kabar24, 23 Mei 2014). Ungkapan senada juga dibuat oleh Kemenlu ketika sengketa Indonesia-Singapura berhasil diurai: "*The settlement of the negotiations [...] may also serve as reference for peaceful resolution of other maritime disputes between countries in the region, by implementing the principles of the international maritime law.*" (Jakarta Globe, 5 September 2014).

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa, bagi Yudhoyono, penyelesaian sengketa perbatasan bukan hanya penting untuk memastikan kedaulatan Indonesia terlindungi. Isu sengketa perbatasan juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang menjunjung tinggi perdamaian dan tata internasional. Manuver ini memperoleh apresiasi dari masyarakat internasional. Seiring dengan

selesainya sengketa maritim antara Indonesia dan Filipina, Presiden Filipina, Benigno Aquino III, mengatakan: "*It [negosiasi Indonesia-Filipina] serves as solid proof to our steadfast commitment to uphold the rule of law and pursue the peaceful and equitable settlement of maritime concerns.*" (BBC, 23 Mei 2014).

Pendekatan yang kontras dilakukan oleh Jokowi. Pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap yang cenderung asertif dalam merespon isu teritori, khususnya dalam kedaulatan Indonesia di laut. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Jokowi mengungkapkan perlunya Indonesia untuk kembali ke laut karena "di laut justru kita jaya" (Antara, 20 Oktober 2014). Untuk itu, Jokowi menambahkan, "Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita. Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita. Kita berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita" (Tirto, 16 Agustus 2017).

Sikap Indonesia yang lebih konfrontatif nampak dalam keputusannya untuk menamai bagian Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara. Melalui penamaan ini, Indonesia mengklaim kepemilikan atas landas kontinen Laut Natuna Utara sesuai dengan aturan mengenai ZEE sejauh 200 mil laut. Sikap Indonesia ini tak pelak memperoleh kritik keras dari Cina. Cina menyatakan bahwa tindakan Indonesia menimbulkan "*complication and expansion of the dispute, and affects peace and stability [...] Indonesia's unilateral name-changing actions are not conducive to maintaining this excellent situation* [kemajuan dalam proses sengketa Laut Cina Selatan]" (Channel Newsasia, 2 September 2017). Meski memperoleh kritik, Indonesia tidak berniat melakukan dialog atas permasalahan ini.

Sikap asertif juga ditunjukkan Indonesia dalam merespon kegiatan IUUF. Sepanjang 2016, pemerintahan Jokowi telah menenggelamkan kurang lebih 256 kapal pencuri ikan yang melanggar perbatasan laut Indonesia. Sementara di pertengahan 2017, tercatat sudah ada 106 kapal yang ditenggelamkan (Kompas, 17 Januari 2017). Seperti yang diutarakan Jokowi dalam pidato kenegaraannya, upaya penenggelaman kapal ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk melindungi nelayan dan

sumber daya laut serta kedaulatan maritim Indonesia “tanpa kompromi” (Suara, 18 Juli 2017). Angka ini meningkat tajam dari masa pemerintahan SBY yang menenggelamkan 37 kapal dan menahan 546 kapal terhitung dari masa kepemimpinannya di 2008-2012.

Langkah ini memperoleh kritik maupun apresiasi dari masyarakat internasional. Respon keras ditunjukkan misalnya oleh China, sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua: “*China strongly protests and condemns such excessive use of force [...] China urges Indonesia to stop taking action that escalates tension, complicates issues, or affects peace and stability*” (Xinhua, 19 Juni 2016). Cina juga menyatakan bahwa tindakan Indonesia melanggar hukum internasional. Di lain sisi, dalam kasus penenggelaman kapal FV Viking, Indonesia dipuji—antara lain oleh pemerintah Norwegia dan organisasi konservasi laut internasional—karena berhasil meledakkan kapal yang dituding melakukan penangkapan ilegal atas ikan bass yang terancam (Washington Post, 15 Maret 2016).

Sikap Jokowi ini berbeda dengan sikap yang diambil oleh Yudhoyono. Chen dan Syailendra (2015) dan Parameswaran (2015) berpendapat bahwa sikap Yudhoyono yang kurang asertif disebabkan oleh keinginannya untuk menjaga status kepantasan dari perilaku Indonesia. Di tengah reputasi Indonesia sebagai negara yang bersahabat, melakukan penahanan dan pengeboman kapal merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan.

Selain mengambil sikap yang lebih asertif, Indonesia di bawah Jokowi juga berupaya memperkuat pertahanan Indonesia. Pada tahun 2016, Jokowi meningkatkan anggaran keamanan yang sebelumnya 0,89% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menjadi 1,1% atau sekitar Rp250 triliun. Jokowi menambahkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat di atas 6%, maka anggaran pertahanan dan keamanan dapat mencapai 1,5% dari PDB (Tempo, 23 Februari 2016). Angka ini naik tajam dari anggaran Yudhoyono pada tahun 2013 sebesar Rp77 triliun. Selain itu, pada tahun 2014 Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 178/2014 tentang pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai komando pengendali operasi keamanan laut Indonesia. BAKAMLA dibentuk Jokowi secara khusus untuk memperkuat batas terluar

Indonesia dengan didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu.

Terakhir, Jokowi selalu menekankan pentingnya persatuan negara-negara untuk melawan IUUF dengan menjadikan IUUF sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi (*transnational-organized crime/TOC*). Paling tidak terdapat empat forum yang pernah dipakai Indonesia untuk memaparkan ide ini yaitu *Second International Symposium on Fish CRIME* pada Oktober 2016 di Yogyakarta, *World Ocean Conference* pada 2016, *World Ocean Summit* pada Februari 2017 di Bali, dan *UN Ocean Conference* pada Juni 2017. Dalam *World Ocean Conference 2016*, Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa IUUF sering dijadikan modus operasi bagi perdagangan manusia, peredaran narkoba atau transaksi hewan langka (VOA, 10 Juni 2017) sehingga perlu diperlakukan sebagai TOC. Jika IUUF telah disepakati sebagai TOC maka akan lebih mudah bagi semua negara dan INTERPOL untuk bekerjasama memberantas kejahatan kriminal yang menjadi bagian dari IUUF. Di titik ini pemerintah Indonesia di bawah Jokowi menawarkan sebuah pendekatan yang berbeda. Jika semula IUUF didekati dengan nalar administratif, kini IUUF dianggap sebagai masalah keamanan dunia. Implikasinya, masalah pencurian ikan yang semula terbatas pada urusan domestik kini harus menjadi masalah internasional yang diselesaikan bersama.

Upaya Indonesia ini memperoleh respon positif dari masyarakat internasional. Presiden Majelis Umum PBB, Peter Thomson, menyatakan bahwa “*IUUF is indeed a transnational crime [...] Ultimately, it is the responsibility of all parties, international organizations, governments, civil society, NGOs and the scientific community. This is not just an individual's responsibility but the responsibility of all of us*” (VOA, 10 Juni 2017). Apresiasi senada diungkapkan oleh sejumlah negara seperti Kanada dan Norwegia. Kedua negara tersebut mengulang argumen Indonesia bahwa IUUF perlu diatasi melalui upaya bersama-sama karena besarnya ancaman yang ditimbulkannya. Seiring dengan makin banyaknya negara yang menyepakati status IUUF sebagai TOC, Indonesia dapat mendorong

terbentuknya institusi internasional yang bekerja untuk mengatasi IUUF.

Diskusi pada sub-bagian ini menggambarkan bagaimana kebijakan Indonesia mengalami perubahan. Di bawah Yudhoyono, Indonesia membangun citra sebagai negara yang dapat bersahabat dengan semua negara. Yudhoyono juga berusaha mewujudkan kepentingan Indonesia—dalam hal ini, kedaulatan wilayah—dengan cara-cara yang dapat meredam konflik di kawasan. Karena itu Yudhoyono berusaha membina hubungan baik dengan negara yang memiliki sengketa teritorial dengan Indonesia serta tidak mengambil sikap konfrontatif dengan negara besar di kawasan, khususnya Cina. Pada tingkat internasional, taktik Yudhoyono ini bertujuan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai *good international citizen* yang peduli pada perdamaian, stabilitas, serta aturan internasional.

Dibaca dalam kerangka konseptual artikel ini, Yudhoyono berupaya meningkatkan pengaruh Indonesia dengan cara berperilaku sesuai narasi *good international citizen* yang dominan dalam politik internasional. Narasi ini—yang dibangun oleh Kanada dan Australia serta mencerminkan nilai-nilai tata dunia liberal yang disangga oleh Amerika Serikat (Evans, 1990; Neufeld, 1995; Cox, 1981)—menuntut negara untuk menjadi demokratis, damai, serta menghormati hukum internasional. Dengan mengikuti preskripsi narasi ini, Yudhoyono berusaha menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang beradab dan memperoleh peran di dalamnya. Hal ini menjelaskan mengapa Yudhoyono enggan mengambil langkah asertif dalam isu perbatasan meskipun aktor domestik mendesaknya. Langkah asertif dapat membuat Indonesia kehilangan statusnya sebagai *good international citizen* dan berimplikasi pada melemahnya *power* normatif Indonesia.

Strategi Yudhoyono karenanya dapat diklasifikasikan dalam kategori *relational power*. Yudhoyono berusaha menyusup ke dalam konstruksi normalitas tertentu—dalam hal ini, *good international citizenship*—dan berupaya meraih *power* dengan mengambil peran di dalamnya.

Sementara itu Jokowi mengambil pendekatan yang berbeda. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia tidak banyak menunjukkan keinginan untuk mengikuti narasi *good international citizen*. Indonesia mengambil sikap yang lebih konfrontatif dan tak segan menciptakan friksi dengan negara tetangga maupun negara berpengaruh di kawasan, seperti Cina. Dalam kasus penenggelaman kapal, Indonesia mengambil posisi yang ambigu terhadap hukum dan norma internasional. Jokowi juga berupaya melakukan inisiatif agar IUUF diakui sebagai TOC. Manuver ini memungkinkan Indonesia untuk mendorong kreasi institusi internasional yang kondusif bagi kepentingannya untuk memerangi IUUF dan menjaga kedaulatan laut.

Sikap Jokowi yang lebih asertif menunjukkan bahwa Indonesia berusaha membangun jarak dari negara-negara berpengaruh dan aturan main yang mereka ciptakan. Keputusan Indonesia untuk tak lagi menjadi negara *bridge-builder* menggambarkan upaya Indonesia untuk menjauh dari konstruksi *good international citizen* Barat. Di lain sisi, konfrontasi dengan Cina juga mengekspresikan keinginan Indonesia untuk tidak mengakui Cina sebagai hegemon kawasan. Sebaliknya, Indonesia berusaha mengajukan konsepsi baru tentang bagaimana negara-negara—terutama di kawasan Asia Timur dan Tenggara—mesti berperilaku. Meski masih berada di tahap awal, Indonesia mendorong negara-negara untuk memperlakukan kedaulatan maritim secara serius. Aksi agresif Indonesia terhadap IUUF mengirimkan sinyal bahwa intrusi terhadap wilayah maritim suatu negara—walau dilakukan oleh nelayan sekalipun—tidak dapat diterima. Melalui kampanyenya mengenai IUUF sebagai TOC, Indonesia berupaya memperkenalkan gagasan ini sembari mendorong pelembagaannya dalam tata pergaulan internasional. Dalam hal ini, Jokowi sungguh-sungguh menjadikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai basis dari politik luar negerinya.

Indonesia di bawah Jokowi karenanya memiliki kecenderungan bergerak ke arah *meta-power*. Hal ini dilakukan mula-mula dengan membangun jarak dari pengaruh negara-negara Barat maupun Cina. Indonesia selanjutnya berusaha mempromosikan

gagasannya tentang kedaulatan maritim sebagai normalitas alternatif serta mendorong institusionalisasi gagasan tersebut melalui kampanye mengenai IUUF.

Perbedaan pendekatan antara Yudhoyono dan Jokowi tak pelak membuat masyarakat internasional mengambil sikap yang berbeda. Perilaku Indonesia pada era Yudhoyono direspon dengan cara yang relatif seragam: Indonesia dipahami sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian serta stabilitas tata internasional. Perilaku Indonesia pada era Jokowi dilihat dengan cara yang lebih ambigu. Indonesia di satu sisi dipotret sebagai negara yang memiliki inisiatif untuk mengatasi IUUF. Namun, di sisi lain, Indonesia juga dituding mengancam perdamaian dan stabilitas regional dan internasional melalui perilakunya yang asertif, khususnya oleh Cina.

Demokrasi, Islam, dan Hak Asasi Manusia

Presiden Yudhoyono dan Jokowi selalu meletakkan isu demokrasi, Islam, dan HAM sebagai bagian dari politik luar negeri mereka. Pada prinsipnya, Yudhoyono dan Jokowi berupaya membangun citra Indonesia sebagai negara yang demokratis, peduli pada HAM, serta memiliki corak Islam yang moderat. Meski demikian, keduanya memberi beban yang berbeda terhadap isu ini. Strategi Yudhoyono memberikan peran yang lebih sentral kepada isu demokrasi, Islam, dan HAM dibandingkan Jokowi yang menjadikan isu maritim sebagai poros strategi politik luar negerinya.

Di samping itu, Indonesia di bawah Yudhoyono cenderung lebih ketat dalam menjaga citra Indonesia sebagai negara demokratis, pro-HAM, dan moderat. Hal ini berbeda dengan Jokowi yang berupaya menyeimbangkan tuntutan masyarakat internasional (agar Indonesia bersikap demokratis, pro-HAM, dan moderat) dengan gagasan kedaulatan nasional. Keinginan untuk membangun keseimbangan antara tuntutan internasional dan kedaulatan nasional membuat Indonesia, dalam sejumlah kesempatan, mengambil sikap yang tak sejalan dengan tuntutan masyarakat internasional.

Selama masa kepemimpinan Yudhoyono, Indonesia berusaha keras menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia merupakan

negara demokratis, mengupayakan perlindungan HAM, serta memiliki corak Islam yang moderat. Dalam pidatonya, Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia merupakan “*the country where democracy, Islam, and modernity go hand-in hand*”. Menlu Natalegawa (2010) menyatakan visi ini secara lebih eksplisit:

"Indonesia continues to use a soft power approach through deradicalisation programmes and initiatives, We promote in our society a culture of tolerance and the value of moderation. In our foreign policy we advocates and promotes interfaith dialogue and dialogue among civilizations, promotes pluralism and tolerance between faiths."

Untuk menurunkan visi ini, Indonesia di bawah Yudhoyono memulai berbagai inisiatif. Indonesia, misalnya, membentuk forum dialog lintas iman dengan Amerika Serikat dan Italia. Pada Februari 2012, 24 pemimpin agama Samawi dari Indonesia dan AS mengadakan sebuah rangkaian perjalanan ke enam kota dan bertemu dengan pemangku kebijakan terkait untuk membicarakan tantangan-tantangan perdamaian. Yudhoyono menciptakan *Bali Democracy Forum* (BDF) sebagai wadah pertukaran pandangan mengenai demokrasi di antara negara-negara Asia-Pasifik agar mendukung “*the attainment of democracy in the region*” (Yudhoyono, 2012). Di samping itu, Indonesia turut mendorong ASEAN maupun negara anggotanya—seperti Myanmar—agar memperkuat komitmennya terhadap HAM serta demokrasi. Inisiatif-inisiatif ini dibuat untuk menegaskan komitmen Indonesia bahwa perilaku yang tak demokratis, tak sensitif terhadap HAM, serta bersifat diskriminatif tidak dapat diterima dalam pergaulan internasional.

Langkah-langkah Yudhoyono memperoleh banyak apresiasi dari masyarakat internasional. Ratu Elizabeth mengungkapkan:

"Under your leadership Mr. President, Indonesia has performed a remarkable transformation. It is now a thriving democracy and one of the world fastest growing economy. Which is playing a greater role in international stage. [...] We share some common values. [...] For example you have shown regional leadership, in spreading the values of Indonesian vibrant democracy through Bali Democracy Forum. I congratulate you in this increasingly influential event."

Menlu AS, Hillary Clinton, menambahkan bahwa AS berniat "to listen as well as talk to those around the world, to support a country [Indonesia] that has demonstrated so clearly [...] that Islam, democracy and modernity cannot only coexist but thrive together" (The Telegraph, 18 Februari 2009).

Indonesia mengambil pendekatan yang cukup berbeda ketika dipimpin oleh Jokowi. Dalam manifestonya, Jokowi menyatakan bahwa ia akan "memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokratis dan berpenduduk mayoritas Muslim moderat dalam mendorong kerja sama global dan regional untuk membangun demokrasi dan toleransi antar kelompok" (2014: 13). Meskipun demikian, Indonesia tidak berupaya memproyeksikan demokrasi dan Islam moderat sebagai identitas utama dalam politik luar negerinya. Indonesia akan "mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional" (2014: 12). Pada gilirannya, politik luar negeri Indonesia ini dibangun di atas keinginan Jokowi untuk memastikan Indonesia berdaulat, dicirikan dengan "kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasikan kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara" (Widodo dan Kalla, 2014: 12).

Pada tataran praktik, visi ini mendorong Jokowi untuk tak menghadiri BDF pada tahun 2015. Kehadirannya pada tahun 2016 sendiri dapat dimengerti lebih sebagai upayanya untuk menjaga citra Indonesia di tengah sederet Aksi Bela Islam (ABI) pada pengujung tahun itu. Jokowi juga melakukan serentetan hukuman mati yang sebelumnya dimoratorium oleh Yudhoyono.

Masyarakat internasional mengajukan berbagai kritik terhadap posisi Indonesia selama Jokowi memimpin. Uni Eropa (UE), misalnya, mengeluarkan pernyataan yang memprotes hukuman mati sebagai "*a cruel and inhumane punishment*" (UE, 2016) serta pemberlakuan hukum penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama. UE (2017) menyatakan:

"The European Union has always praised the leadership of Indonesia as the world largest Muslim majority country, a strong democracy and a country with a proud tradition of tolerance and pluralism. We

call on the Indonesian government, its institutions and its people to continue this long standing tradition of tolerance and pluralism. [...] The European Union has consistently stated that laws that criminalize blasphemy when applied in a discriminatory manner can have a serious inhibiting effect on freedom of expression and on freedom of religion or belief."

Dalam menghadapi kritik-kritik ini, Jokowi berusaha menegaskan bahwa eksekusi hukuman mati merupakan domain "kedaulatan hukum dan politik Indonesia" (BBC, 24 Februari 2015). Sementara itu, dalam ceramahnya di Universitas Oxford tentang kasus Basuki Tjahaja Purnama, Jusuf Kalla menyatakan:

"Indonesia has the law on blasphemy as other countries have their own regulation to respect others [...] It means the majority of the voters are Muslims so it was not religious discrimination. It's democracy" (Republika, 19 Mei 2017).

Meski demikian, bukan berarti bahwa Indonesia telah meninggalkan citranya sebagai negara dengan Islam yang moderat. Dalam pidatonya, Kalla segera menambahkan bahwa toleransi di Indonesia masih berjalan dengan baik. Dalam wawancaranya dengan AlJazeera, Jokowi juga meyakinkan masyarakat internasional bahwa Islam di Indonesia tetap pluralis dan toleran (Al Jazeera, 7 Mei 2017).

Ilustrasi-ilustrasi di atas menunjukkan bahwa posisi Jokowi dalam isu demokrasi, Islam, dan HAM menyimpan banyak ambiguitas. Di satu sisi, pemerintahan Jokowi berupaya terus mempertegas citra Indonesia sebagai negara demokratis, taat HAM, dan moderat. Di lain sisi, Jokowi berupaya membangun jarak dari tuntutan-tuntutan masyarakat internasional melalui argumen kedaulatan.

Diskusi pada sub-bagian ini telah menggambarkan bagaimana posisi Indonesia dalam isu demokrasi, Islam, dan HAM mengalami perubahan. Pemerintahan Yudhoyono berusaha membangun reputasi Indonesia yang kokoh dalam isu ini. Yudhoyono menerima preskripsi masyarakat internasional tentang bagaimana suatu negara semestinya berperilaku dan merancang politik luar negeri Indonesia berdasarkan preskripsi itu. Preskripsi ini—yang utamanya disokong oleh negara-negara Barat—menuntut Indonesia untuk mengimplementasikan demokrasi, melindungi HAM,

serta memastikan moderasi Islam. Yudhoyono kembali menyusup ke dalam narasi ini serta berusaha membangun *power* Indonesia dengan menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia mampu memenuhi preskripsi-preskripsi tersebut.

Yudhoyono kembali mengaplikasikan pendekatan *relational power* dalam strateginya. Indonesia berusaha memperkuat posisinya dalam politik internasional dengan memasuki narasi demokrasi, HAM, dan moderasi yang hegemonik.

Sementara itu, meskipun tak menyisihkan isu demokrasi, moderasi Islam, dan HAM, Jokowi berupaya menjadikan identitas maritim Indonesia sebagai tulang punggung politik luar negeri Indonesia. Jokowi juga mengambil langkah yang lebih asertif dalam isu ini. Jokowi mengambil langkah yang tak sejalan dengan narasi HAM (lewat pelaksanaan hukuman mati) serta menolak berbagai tuduhan bahwa pluralisme Indonesia mengalami kemunduran. Meski demikian, Jokowi tak serta-merta menolak narasi demokrasi, HAM, dan moderasi. Dalam berbagai kesempatan, ia tetap meyakinkan masyarakat internasional bahwa Indonesia merupakan negara demokratis, taat HAM, serta moderat.

Upaya Jokowi ini dapat dimengerti sebagai cerminan dari keinginannya untuk menyeimbangkan tuntutan masyarakat internasional dan imperatif kedaulatan. Di satu sisi, Jokowi tidak kuasa dan tidak berkepentingan untuk sepenuhnya menolak narasi demokrasi, HAM, dan moderasi. Di sisi lain, keinginan untuk menampilkan citra Indonesia yang lebih independen menuntut Jokowi untuk membangun jarak dengan tuntutan-tuntutan ini. Meskipun langkah ini belum dapat dikategorikan sebagai suatu *meta-power*, langkah Jokowi di atas menggambarkan bahwa Indonesia mulai bergerak untuk meninggalkan pendekatan *relational power* dalam isu demokrasi, HAM, dan moderasi.

Pergeseran strategi dari Yudhoyono ke Jokowi membuat masyarakat internasional menggeser pandangannya terhadap Indonesia. Jika Indonesia semula diapresiasi karena usaha-usahnya untuk menegaskan demokrasi, moderasi, dan HAM, Indonesia di bawah Jokowi dirasa mengalami langkah mundur dalam isu ini.

KESIMPULAN

Artikel ini berupaya mempelajari perubahan strategi diplomasi Indonesia sebagai negara *middle power* dari Presiden Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Dengan menggunakan isu perbatasan dan maritim serta demokrasi, Islam, dan HAM, artikel ini menunjukkan bahwa strategi Indonesia mengalami perubahan.

Dalam isu-isu yang dibahas oleh artikel ini, Indonesia di bawah pemerintahan Yudhoyono berusaha membangun kekuatan Indonesia dengan cara mengikuti konstruksi hegemonik mengenai *good international citizen* dalam politik internasional. Indonesia di bawah era Yudhoyono mengikuti preskripsi yang dominan dalam tata ekonomi-politik liberal tentang bagaimana semestinya negara berperilaku. Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi menawarkan pendekatan yang berbeda. Jokowi mendorong Indonesia untuk bertindak lebih asertif dalam politik internasional. Dalam sejumlah kesempatan, Indonesia berupaya mendemonstrasikan keinginannya untuk membangun jarak dengan kekuatan yang dominan dalam politik internasional dan regional dalam rangka menegaskan independensinya.

Tren perubahan ini menggambarkan bahwa pemerintahan Yudhoyono berusaha membangun pendekatan diplomasi *middle power* yang berorientasi pada *relational power*. Sementara itu, Jokowi membawa Indonesia bergerak lebih dekat ke arah *meta-power*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini ditulis atas dukungan finansial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Program Hibah Riset, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat 2017. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan tersebut. Isi dari artikel ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis.

CATATAN BELAKANG

¹ Terminologi "*inward looking*" dan "*outward looking*" dikritik dalam perdebatan mengenai politik luar negeri Indonesia kontemporer karena dipandang memiliki akurasi yang lemah. Analisis Poole (2015), Sukma (2016), dan Weatherbee (2016), misalnya, menggambarkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi tetap terlibat dalam sejumlah forum multilateral. Jokowi sendiri menolak Indonesia disebut sebagai negara "*inward looking*" (Parameswaran, 2015). Walau demikian, terminologi seperti

“*inward looking*” masih berguna untuk merujuk pada kecenderungan Indonesia di bawah Jokowi yang menjadikan kepentingan domestik sebagai basis bagi keputusan Indonesia untuk melibatkan atau tidak melibatkan diri dalam berbagai forum multilateral. Artikel ini menggunakan istilah “*inward looking*” dalam konteks ini. Istilah “*outward looking*”, sebaliknya, menggambarkan tendensi Indonesia untuk terlibat dalam forum-forum multilateral dalam rangka membangun reputasi internasional Indonesia sebagai “warga negara dunia yang baik” (*good international citizen*).

² Menteri Luar Negeri Yudhoyono (2009-2014), Marty Natalegawa menafsirkan *middle power* sebagai negara yang menjadi “*bridge builders*” dan bekerja untuk “*building*

consensus, and achieving cooperative partnerships” (Jeju Peace Institute, 2017: 51). Menteri Luar Negeri Jokowi, Retno Marsudi, juga cenderung mengasosiasikan *middle power* dengan negara yang terlibat dalam upaya menciptakan “perdamaian dan keamanan dunia” melalui organisasi internasional (Sekretariat Kabinet, 8 Januari 2015).

³ Penting untuk digarisbawahi bahwa Krasner tak mengklaim bahwa ia telah menciptakan terminologi-terminologi ini. Dalam karyanya, ia merujuk pada, antara lain, karya Baumgartner, Buckley, dan Burns. (1975 dan 1976) sebagai karya yang mula-mula mengajukan istilah *relational power* dan *meta-power*.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Acharya, A. (2015). *Indonesia matters: Asia's emerging democratic power*. Singapore; Hackensack, N.J.: World Scientific Pub. Co.
- Andika, Muhammad (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy, *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2.
- Azra, A. (2015). Indonesia's Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond. Dalam J. Melissen & Y. Sohn (Eds.), *Understanding Public Diplomacy in East Asia* (pp. 131–154). New York: Palgrave Macmillan US.
- Barnett, M. N., & Duvall, R. (Eds.). (2005). *Power in global governance*. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.
- Beeson, M., & Lee, W. (2015). The Middle Power Moment: A New Basis for Cooperation between Indonesia and Australia? Dalam C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian (Eds.), *Indonesia's Ascent* (pp. 224–243). London: Palgrave Macmillan UK. Diambil dari http://link.springer.com/10.1057/9781137397416_11
- Berenskoetter, F., & Williams, M. J. (Eds.). (2007). *Power in world politics*. London; New York: Routledge.
- Chapnick, A. (1999). The middle power. *Canadian Foreign Policy Journal*, 7(2), 73–82. <https://doi.org/10.1080/11926422.1999.9673212>
- Chen, J. (tanpa tahun). *Indonesia's Foreign Policy under Widodo: Continuity or Nuanced Change?* Perth USASIA Centre.
- Chen, J., Gleason, A., Nabbs-Keller, G., Sambhi, N., Springer, K., Tanu, D., & Perth USAsia Centre. (2014). *New perspectives on Indonesia: understanding Australia's closest Asian neighbour*.
- Chen, Jonathan, and Syailendra, Emirza. (2015). Jokowi's Vessel Sinking Policy: A Question of Propriety, *RJSI Commentary*, No. 126, Februari.
- Cooper, A. F. (1997). Niche Diplomacy: A Conceptual Overview. Dalam A. F. Cooper (Ed.), *Niche Diplomacy* (pp. 1–24). London: Palgrave Macmillan UK. Diambil dari http://link.springer.com/10.1007/978-1-349-25902-1_1
- Cooper, A. F., Higgott, R. A., & Nossal, K. R. (1993). *Relocating middle powers: Australia and Canada in a changing world order*. Vancouver: UBC Press.
- Cox, R. W. (1981). *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory*. Millennium, 10(2), 126–155. <https://doi.org/10.1177/03058298810100020501>
- Darmosusanto, S. (2009, Oktober). Indonesia: A new “middle power.” *The Jakarta Post*.
- Davies, M., & Harris-Rimmer, S. (2016). Assessing Indonesia's Normative Influence: Wishful Thinking or Hidden Strength: Indonesia's normative influence. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 3(1), 83–91. <https://doi.org/10.1002/app5.119>
- Evans, Gareth. *Foreign Policy and Good International Citizenship*. 6 Maret 1990
- Fealy, G., & White, H. (2016). Indonesia's “Great Power” Aspirations: A Critical View. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 3(1), 92–100. <https://doi.org/10.1002/app5.122>
- Flemes, D. (2007). Emerging Middle Powers' Soft Balancing Strategy: State and Perspectives of the IBSA Dialogue Forum. *German Institute of Global and Area Studies*, No. 57.
- Guzzini, S. (1998). *Realism in international relations and international political economy: the continuing story of a death foretold*. London ; New York: Routledge.
- Harding, Brian dan Stefanie Merchant (2016), *Indonesia's Inward Turn, The Diplomat*.
- Holbraad, C. (1984). *Middle powers in international politics*. London: Macmillan.
- Hynek, N. (2004). Canada as a middle power: conceptual limits and promises. *The Central European Journal of Canadian Studies*, 4, 33–43.
- Jeju Peace Institute (2017), *Middle Power's Role for Asia's Future*, Jeju Forum for Peace and Prosperity 2017
- Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers. *Politikon*, 30(1), 165–181. <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282>

- Krasner, S. D. (1985). *Structural conflict: the Third World against global liberalism*. Berkeley: University of California Press.
- Laksmana, E. (2011). Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter? *Contemporary Southeast Asia*, 33(2), 157.
<https://doi.org/10.1355/cs33-2a>
- Nabers, D. (2015). *A poststructuralist discourse theory of global politics*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Neufeld, M. (1995). Hegemony and Foreign Policy Analysis: The Case of Canada as Middle Power. *Studies in Political Economy*, 48(1), 7–29.
<https://doi.org/10.1080/19187033.1995.11675349>
- Parameswaran, Prashanth, Explaining Indonesia's 'Sink the Vessels' Policy Under Jokowi, *The Diplomat*, 13 Januari 2015.
- Ping, J. (2003, Oktober). *Middle power statecraft: Indonesia and Malaysia*. University of Adelaide.
- Poole, Avery. (2015). Is Jokowi Turning His Back on ASEAN? Indonesia at Melbourne,
<http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/is-jokowi-turning-his-back-on-asean/>
- Rosyidin, Mohamad. (2017). Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century, *South East Asia Research*
- Ruhama, Z. (2016, Agustus). Indonesia's Middle Power Project in the Indo-Pacific: During the Presidencies of Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo, 2004–2016. Flinders University.
- Santikajaya, A. (2016). Walking the middle path: The characteristics of Indonesia's rise. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 71(4), 563–586.
<https://doi.org/10.1177/0020702016686381>
- Sukma, Rizal. (2015). Insight: Does Indonesia see foreign policy as irrelevant? *The Jakarta Post*,
<http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/22/insight-does-indonesia-see-foreign-policy-irrelevant.html>
- Weatherbee, Donald. (2016). Understanding Jokowi's Foreign Policy, *Trends in Southeast Asia*, No. 12, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Pidato, Pernyataan Resmi, dan Surat Kabar**
- Al-Jazeera, *Joko Widodo: Islam in Indonesia is moderate*, 7 Mei 2017,
<https://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2017/05/joko-widodo-islam-indonesia-moderate-170503075654145.html>
- Republika, *Speaking at Oxford, Jusuf Kalla explains about Ahok detention*, 19 Mei 2017,
<http://en.republika.co.id/berita/en/international/17/05/19/oq7cpf414-speaking-at-oxford-jusuf-kalla-explains-about-ahok-detention>
- Sekretariat Kabinet, *Bantah Tarik Diri dari Internasional, Menlu: Indonesia Terus Mainkan Peran 'Middle Power'*, 8 Januari 2015, <http://setkab.go.id/bantah-tarik-dari-dari-internasional-menlu-indonesia-terus-mainkan-peran-middle-power/>
- Antara, *Joko Widodo: Jalesviva Jayamahe*, 20 Oktober 2014,
<http://www.antaranews.com/berita/459658/joko-widodo-jalesveva-jayamahe>
- BBC, *Jokowi: Eksekusi adalah kedaulatan Indonesia*. 24 Februari 2015.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150224_jusufkalla_brasil_eksekusi
- BBC, *Philippines and Indonesia Resolve 20 Years Border Dispute*, 23 Mei 2014.
<http://www.bbc.com/news/world-asia-27535004>
- Channelnews Asia, *China demands Indonesia rescind decision to rename part of South China Sea*, 2 September 2017,
<http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-demands-indonesia-rescind-decision-to-rename-part-of-south-9179992>.
- EU, *EU Local Statement on freedom of religion or belief and freedom of expression*, 9 Mei 2017.
- EU, *Statement by the Spokesperson on the planned executions in Indonesia*, 27 Juli 2016.
- JakartaGlobe, *Indonesia, Singapore agree on border between Batam island and Changi*, 5 September 2014.
<http://jakartaglobe.id/news/indonesia-singapore-agree-border-batam-island-changi/>.
- Kabar24, *Batas ZEE Indonesia dan Filipina ditetapkan, SBY: negosiasi selama 20 tahun*, 23 Mei 2014.
<http://kabar24.bisnis.com/read/20140523/19/230412/batas-zee-indonesia-filipina-ditetapkan-sby-negosiasi-selama-20-tahun>.
- Kompas, *Menteri Susi: 236 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Sepanjang 2016*, 17 Januari 2017,
<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/17/165433626/menteri.susi.236.kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.sepanjang.2016>
- Natalegawa, Marty. 8 Januari 2010. Indonesia and the World 2010. Disampaikan dalam Annual Press Briefing Kementerian Luar Negeri.
- Parameswaran, Prashanth, 29 Oktober 2015, Jokowi Defends Indonesia's Foreign Policy During US Trip, *The Diplomat*.
- Sindonews, *Ribut dengan Malaysia, SBY hindari jalan perang*, 26 Oktober 2011.
<https://nasional.sindonews.com/read/520700/14/ribut-dengan-malaysia-sby-hindari-jalan-perang-1319613978>.
- Suara, *Susi: Penenggelaman Kapal Bukan Kebijakan Jokowi*, 18 Juli 2017,
<https://www.suara.com/news/2017/07/18/134721/susi-penenggelaman-kapal-bukan-kebijakan-jokowi>
- The Jakarta Post. *VP urges int'l audience to respect Ahok verdict*, 20 Mei 2017.
- The Washington Post, *Indonesia's harsh response to illegal fishing: blowing up ships*, 15 Maret 2016,
https://www.washingtonpost.com/news/science/wp/2016/03/15/indonesias-harsh-response-to-illegal-fishing-blowing-up-ships/?utm_term=.fca8778c844a

- Tirto, *Teks Lengkap Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi*, 16 Agustus 2017, <https://tirto.id/teks-lengkap-pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-cuFy>
- Viva, *SBY: Jangan ada tembakan di Ambalat*. 4 Juni 2009. <http://www.viva.co.id/berita/nasional/63517-sby-jangan-ada-tembakan-tni-di-ambalat>
- VOA, *Indonesia urges UN to declare fish theft a transnational crime*, 10 Juni 2017, <https://www.voanews.com/a/indonesia-urges-united-nations-declare-fish-theft-transnational-crime/3895243.html>
- Widodo, Joko dan Jusuf Kalla, 2014. *Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*. Dapat diakses di http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf.
- Xinhua, *China condemns Indonesia's use of force in South China Sea*, 19 Juni 2016, http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/19/c_135449118.htm
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2012. *Pidato*. Disampaikan Pembukaan Bali Democracy Forum 2012.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. Oktober 2009. *Pidato Pelantikan Presiden*. Disampaikan dalam Pelantikan Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan.